

**STRATEGI KORPS PASUKAN KHAS TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN  
 UDARA DALAM OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
 (Studi Kasus Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Kepulauan Mentawai  
 Tahun 2010)**

Frian Alfa Risdar<sup>1</sup>, Yusa Djuyandi<sup>2</sup>, Taufik Hidayat<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Studi Keamanan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

<sup>3</sup>Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email korespondensi: ayangmalay@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Korpaskhas TNI AU dalam operasi dukungan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Korpaskhas TNI AU dalam operasi dukungan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai tahun 2010 yaitu melakukan persiapan personel dan perlengkapan secara cepat dan cermat, membagi pasukan kerja ke dalam unit-unit kecil yang memiliki tugas-tugas tersendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas penanggulangan berdasarkan permintaan atau perintah dari institusi yang lebih tinggi, menggerakkan pasukannya dengan menggunakan perlengkapan khusus, menggunakan taktik tertentu dalam memasuki wilayah terjadinya bencana, dan selalu melaksanakan koordinasi dengan satuan lain pada saat di lapangan.

**Kata Kunci: Strategi, Operasi Militer Selain Perang, Penanggulangan Bencana Alam, Kekuatan Udara, TNI Angkatan Udara, Korpaskhas TNI AU.**

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, dimana secara yurisdiksi nasional Indonesia memiliki luas wilayah  $\pm 7,8$  juta km<sup>2</sup> dengan luas wilayah laut  $\pm 5,9$  juta km<sup>2</sup>. Indonesia memiliki wilayah darat yang terdiri dari 17.499 pulau dimana 5.698 pulau sudah memiliki nama dan 11.801 pulau belum memiliki nama, sehingga garis pantai yang dimiliki Indonesia adalah sepanjang  $\pm 81.000$  km (Marsetio, 2015: 1). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat kaya namun juga merupakan wilayah yang rawan akan bencana. Posisinya yang terletak di garis katulistiwa dan berbentuk kepulauan menimbulkan potensi tinggi untuk berbagai jenis bencana. Pulau-pulau di Indonesia terletak pada tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia yang menyebabkan potensi tinggi terhadap

terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan gerakan tanah (tanah longsor).<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dapat diketahui bahwa kejadian

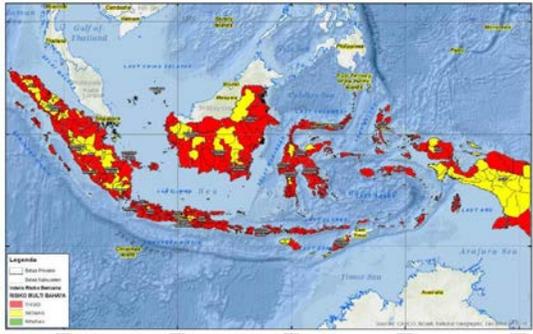
bencana di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada kurun waktu tersebut Indonesia dilanda 11.274 kejadian bencana yang telah menelan korban jiwa sebanyak 193.240 orang dan mengakibatkan total kerugian sekurang-kurangnya Rp. 420 triliun. Kejadian bencana itu antara lain gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias (2004), gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006), gempa bumi Sumatera Barat (2007), banjir Jakarta (2007), gempa bumi Bengkulu (2007), gempa bumi Sumatera Barat (2009), tsunami Mentawai (2010), banjir bandang Wasior (2010), erupsi Gunung Merapi (2010), lahar dingin Gunung Merapi (2011), serta banjir

Jakarta (2012, 2013 dan 2014), erupsi Gunung Sinabung (2013, 2014).<sup>2</sup>

Pada tahun 2014, BNPB meluncurkan Indeks Risiko Bencana di Indonesia dan dalam peta IRBI tersebut dapat di lihat bahwa tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang bebas dari ancaman bencana alam.<sup>3</sup>

**Gambar 1.1**

**Peta Indeks Risiko Bencana di Indonesia**



Melihat besarnya kemungkinan terjadinya bencana alam di Indonesia, maka seluruh pihak harus berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana alam, termasuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU). TNI AU merupakan salah satu komponen bangsa dan alat negara dalam bidang pertahanan dan keamanan yang memiliki tugas pokok melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya pada OMSP yang dilaksanakan oleh TNI terdiri dari 14 macam operasi dimana salah satunya adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Salah satu satuan TNI AU yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan penanggulangan bencana adalah Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) TNI Angkatan Udara (TNI AU). Korpaskhas merupakan salah satu kekuatan udara di bawah organisasi TNI AU. Berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 11 Tahun 2013, tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, Korpaskhas bertugas membina kekuatan dan kemampuan satuan Pasukan sebagai pasukan matra udara untuk siap operasional dalam melaksanakan perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan

Udara, pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra udara dalam operasi militer atas kebijakan Panglima TNI.

Dalam melaksanakan OMSP penanggulangan bencana alam, Korpaskhas TNI AU memiliki kekuatan khusus. Kekuatan Korpaskhas TNI AU tersebut merupakan tim-tim khusus yang menjadi sesuatu yang khas yang dimiliki oleh Detasemen Matra 1 dan Detasemen Matra 2. Tim-tim yang dimaksud adalah Tim Pengendali Tempur (Dalpur), Tim Pengendali Pangkalan (Dallan), Tim SAR Tempur (Sarpur), dan Tim *Jump Master* (JM) yang memiliki kemampuan untuk digerakkan secara cepat serta dapat masuk ke dalam wilayah bencana melalui tiga media (Trimedia) yaitu melewati darat, laut, maupun udara (diterjunkan). Keempat tim tersebut merupakan kelompok yang memiliki tugas-tugas tertentu dan merupakan tugas yang dianggap khusus oleh Korpaskhas dan TNI AU termasuk salah satunya adalah melaksanakan tugas untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat bencana alam ke wilayah-wilayah terpencil atau terluar yang sulit untuk dicapai.

Salah satu operasi penanggulangan bencana alam yang pernah dilaksanakan oleh Korpaskhas TNI AU adalah operasi tanggap darurat pasca terjadinya gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dimana pada tanggal 25 Oktober 2010, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,2 Skala Richter pada kedalaman 10 km di wilayah pantai barat Sumatra yang menimbulkan tsunami di kepulauan Mentawai. Akibat gempa bumi dan tsunami tersebut fasilitas komunikasi di Mentawai terputus bahkan telepon satelit pun tidak dapat digunakan sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk mengetahui kondisi kepulauan Mentawai saat itu. Selain putusnya komunikasi, kondisi cuaca yang cepat berubah dan diperparah dengan gelombang laut yang cukup tinggi mengakibatkan kapal yang hendak memberikan bantuan mengalami kesulitan untuk memasuki wilayah kepulauan Mentawai. Akibat hal tersebut akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2010, Presiden RI memerintahkan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) untuk melaksanakan penerjunan bantuan melalui jalur udara, karena jalur laut maupun jalur darat sama sekali tidak

dapat dilalui saat itu. Pada tanggal 28 Oktober 2010, TNI AU menerjunkan 15 anggota Batalyon 461 Paskhas yang terdiri dari 13 anggota Tim Pengendali Tempur (Tim Dalpur), 1 anggota Tim Pengendali Pangkalan (Tim Dallon), dan 1 anggota Tim *Search and Rescue* (SAR) Tempur (Tim Sarpur). Tim tersebut memiliki tugas untuk memberikan informasi tentang kondisi Mentawai pasca tsunami dan memberikan kendali terhadap pemberian bantuan melalui penerjunan dari pesawat (Laporan Pelaksanaan Dukungan Penanggulangan Bencana Alam Di Kepulauan Mentawai 2010).

Dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawabnya, termasuk dalam melaksanakan operasi penanggulangan bencana alam, Korpaskhas TNI AU tentu saja selalu berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut dengan optimal, walaupun masih banyak kendala yang harus dihadapi. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka Korpaskhas TNI AU selalu melaksanakan serta merumuskan strategi- strategi yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan semua tugas dan tanggungjawabnya.

## LANDASAN TEORI

### Operasi Militer Selain Perang

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah operasi yang dilakukan oleh pasukan militer untuk menjaga keamanan nasional dan kepentingan pembangunan negara, yang bukan merupakan perang (Gaoyue dan Char, 2019: 3). Selain itu definisi lain dari OMSP adalah penggunaan kemampuan militer di berbagai operasi militer selain perang. Operasi-operasi ini dapat diterapkan untuk melengkapi komponen kekuatan nasional lainnya. OMSP fokus pada pencegahan perang, penyelesaian konflik, perdamaian, dan mendukung otoritas sipil dalam menanggapi krisis domestik. Pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang memiliki beberapa prinsip pelaksanaan, yang terdiri dari legitimasi, sasaran, kesatuan tujuan, keamanan, ketekunan, dan pengendalian (Shalikhshvili et al, 1995: I.1).

### Strategi Militer dalam Operasi Militer Selain Perang

Salah satu bentuk strategi yang berkaitan kegiatan militer baik dalam hal Operasi Militer

Perang (OMP) ataupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah strategi militer. Strategi militer adalah sebuah seni dan ilmu mengkoordinasikan pembinaan, penggelaran, dan penggunaan kekuatan militer dalam rangka mencapai tujuan keamanan nasional (Drew dan Snow, 2014: 17).

Strategi militer terdiri atas empat unsur, yaitu:

#### 1. Strategi Penggunaan Kekuatan

Pada tingkat strategi militer, yang dimaksud dengan penggunaan kekuatan adalah penggunaan dalam skala yang lebih luas dan nasional. Keputusan penggunaan kekuatan bergantung pada persepsi ancaman.

#### 2. Strategi Pembinaan Kekuatan

Strategi tentang pembinaan kekuatan dalam arti luas menentukan apa yang harus dilakukan, dimana dan bagaimana harus dilakukan, keputusan ini juga merupakan daya dorong utama dibalik keputusan tentang strategi pembinaan kekuatan. Pembinaan kekuatan membutuhkan sumber daya untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik. Seberapa banyak, jenisnya apa, dan bagaimana sumber daya ini dikelola dan dibentuk menjadi struktur kekuatan menjadi tanggung jawab pembinaan kekuatan.

#### 3. Strategi penggelaran kekuatan.

Pemahaman mengenai siapa musuh kita dan dimana pasukan kemungkinan akan digunakan akan selalu menjadi faktor pendorong dalam penggelaran pasukan. Rancangan struktur kekuatan akan sama-sama menjadi pertimbangan penting, terutama besarnya pasukan, ciri-ciri alat-peralatan, dan kemampuan angkut. Faktor geografi juga memegang peranan penting, terutama pada saat perang.

#### 4. Koordinasi strategi militer.

Koordinasi antar tiga unsur militer (penggunaan, pembinaan, dan penggelaran), adalah suatu kegiatan dalam bidang manajemen risiko. Para pakar strategi harus menentukan pilihan sulit dan memahami resiko setiap pilihannya (Drew dan Snow, 2014: 73-80).

### Kekuatan Udara

Air power dapat diterjemahkan secara bebas sebagai kekuatan negara di ruang udara (bagian dari aerospace power). Dengan meminjam

batasan yang diberikan Cooper dalam Salatun (2000: 1), air power dapat diartikan sebagai “The Ability of a nation to act through the air space, in other words, to use controlled flight – such, for instance, as the flight of aircraft”.

Salatun (2000: 164-165) selanjutnya menjelaskan bahwa kekuatan udara adalah kemampuan total suatu bangsa untuk berbuat sesuatu melalui media udara (dirgantara), dan angkatan udara merupakan sarana militer yang utama bagi suatu bangsa yang menghasilkan kekuatan udara. Setiap sarana militer terdiri dari empat unsur, yaitu perlengkapan, fasilitas, manusia, dan organisasi yang menopang ketiga unsur lainnya. Unsur utama yang membedakan satu angkatan dengan angkatan lainnya ialah perlengkapan yang merupakan alat utama sistem senjatanya. Ciri yang menonjol dari alat utama sistem senjata udara ialah bahwa alat tersebut beroperasi di udara, seperti pesawat udara bersayap tetap, helikopter, dan pesawat tanpa awak. Kemampuan operasionalnya seperti kecepatan, jarak capai, manuver, daya gerak atau mobilitas, fleksibilitas, cepat tanggap, bertumpu pada sifat-sifat media udara, karena media mempengaruhi perlengkapan yang ada dan manfaat pengembangan teknologinya dimasa depan. Unsur kedua adalah organisasi, khususnya yang menyangkut tugas pokok. Pada dasarnya tugas pokok angkatan udara dapat dibagi menjadi dua, yaitu penguasaan udara (dirgantara) dan dukungan kepada angkatan darat dalam rangka penguasaan daratan, dan kepada angkatan laut dalam rangka penguasaan lautan. Manajemen Bencana

Menurut Asian Disaster Reduction Centre (2003), bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material, dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. Lebih lanjut menurut Parker (1992), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula didalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu, maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas (Khambali, 2017: 2).

Dalam penanganan bencana diperlukan adanya manajemen bencana. Manajemen bencana

(disaster management) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanga fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan yang ada pada tiap-tiap kuadran/siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuan (secara umum) antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari ancaman bencana (Nurjanah, dkk., 2013: 42).

Secara umum manajemen bencana dan keadaan darurat adalah tahapan prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Riset. (2) Analisis kerawanan dan kajian risiko. (3) Sosialisasi dan kesiapan masyarakat. (4) Mitigasi atau persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat. (5) Warning atau peringatan bencana. (6) Tindakan penyelamatan. (7) Komunikasi. (8) Penanganan darurat. (9) Keberlangsungan penanganan (10) Upaya perbaikan. (11) Pelatihan dan Pendidikan. (12) Simulasi (Khambali, 2017:51-52).

Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan apa azas/prinsip-prinsip utama kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian,, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis yang terdiri dari cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdayaguna dan berhasilguna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif, serta non proselitisi (Nurjanah, dkk., 2013: 45-47)

## METODE

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini dengan alasan karena peneliti berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara cermat, terperinci dan mendalam mengenai strategi Korpaskhas TNI AU dalam operasi dukungan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai tahun 2010 dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data di antaranya wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan, serta studi dokumen. Selanjutnya untuk pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini adalah karena peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis kegiatan atau aktivitas Korpaskhas TNI AU dalam operasi dukungan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai tahun 2010, dimana pada penanggulangan bencana tersebut Korps Paskhas TNI AU memiliki peran yang sangat besar dalam melaksanakan aktivitas tanggap darurat. Dalam menentukan informan guna memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data Interaktif Miles dan Huberman dimana analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 25 Oktober 2010, terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,2 Skala Richter pada kedalaman 10 km di wilayah pantai barat Sumatra yang menimbulkan tsunami di Kepulauan Mentawai. Akibat gempa bumi dan tsunami tersebut fasilitas komunikasi di Mentawai terputus bahkan telepon satelit pun tidak dapat digunakan sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk mengetahui kondisi kepulauan Mentawai saat itu. Selain putusnyakomunikasi, kondisi cuaca yang cepat berubah dan diperparah dengan gelombang laut yang cukup tinggi mengakibatkan kapal yang hendak memberikan bantuan mengalami kesulitan untuk memasuki wilayah kepulauan Mentawai.

Akibat hal tersebut akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2010 Presiden RI memerintahkan Kasau untuk melaksanakan penerjunan bantuan melalui jalur udara, karena jalur laut maupun jalur darat sama sekali tidak dapat dilalui saat itu (Laporan Pelaksanaan Dukungan Penanggulangan Bencana Alam Di Kepulauan Mentawai 2010).

Pada tanggal 28 Oktober 2010 TNI AU menerjunkan 15 anggota Batalyon 461 Paskhas yang terdiri dari 13 anggota Tim Pengendali Tempur (Tim Dalpur), 1 anggota Tim Pengendali Pangkalan (Tim Dallon), dan 1 anggota Tim *Search and Rescue* (SAR) Tempur (Tim Sarpur). Dalam melaksanakan operasi dukungan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai tersebut, Korpaskhas TNI AU tentu saja merumuskan serta melaksanakan strategi-strategi yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya. Adapun strategi yang dilaksanakan Korpaskhas TNI AU tersebut merupakan semua upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai optimalitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan tujuan utama untuk menjaga keamanan nasional.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Dukungan Penanggulangan Bencana Alam Di Kepulauan Mentawai 2010, tugas utama dari Tim Dalpur saat itu adalah pembuatan Posko TNI AU, mengendalikan penerbangan, membuka jalan guna pendistribusian bantuan dan evakuasi korban, serta melaksanakan SAR secara terbatas. Tim Dalpur memasuki wilayah Kepulauan Mentawai dengan melakukan penerjunan tanggal 28 Oktober 2008 di dua tempat yaitu pada koordinat 03<sup>o</sup>07'00" S 100<sup>o</sup>20'00" E dan 02<sup>o</sup>45'00" S 100<sup>o</sup>00'00" E. Sejumlah 15 orang anggota Tim Dalpur *plus* Batalyon 461 Paskhas, diterjunkan pada jam 08.20 WIB di wilayah Pagai Utara dan pukul 09.20 WIB di wilayah Pagai Selatan dengan menggunakan 1 pesawat C-130 Hercules yang diberangkatkan dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta. Tim tersebut mendarat di daerah Silabu (Pulau Pagai Utara) dan Pororogat (Pulau Pagai Selatan) dan menjadi prajurit TNI pertama yang dapat masuk ke wilayah Kepulauan Mentawai untuk membuka akses dan memberikan bantuan melalui jalur udara. Satuan lainnya masih terhambat karena adanya badai laut yang terjadi di Samudera Hindia.

Dari hasil wawancara dengan anggota Tim Dalpur yang melakukan penerjunan ke Kepulauan

Mentawai, penerjunan saat itu menggunakan metode *blind drop*, yaitu penerjunan ke suatu wilayah baru yang tidak diketahui kondisi cuaca dan permukaan tanahnya serta menggunakan alat bantu navigasi selama penerjunan tersebut. Penerjunan menggunakan metode ini sangat berisiko tinggi karena selain tidak mengetahui karakteristik wilayah, penerjunan juga harus tetap dilakukan meskipun dalam kondisi cuaca yang buruk. Menurut Komandan Tim Dalpur, Lettu Firasat, perintah penerjunan di Mentawai merupakan perintah mendadak dengan persiapan dalam waktu yang singkat, yaitu hanya sekitar 12 jam. Persiapan tim dilaksanakan di Batalyon 461 Paskhas. Setelah memperoleh perintah, tim berupaya mencari data tentang kondisi bencana di Mentawai, namun data yang diperoleh sangat sedikit dan hanya bersumber dari *internet*. Keterbatasan persediaan informasi di kantor serta akses kepada institusi kebencanaan yang belum terbuka, menyebabkan informasi yang diperoleh menjadi tidak maksimal. Penentuan koordinat DZ penerjunan hanya berdasarkan program *Google Earth* karena Batalyon 461 Paskhas tidak memiliki peta Kepulauan Mentawai. Penentuan kondisi permukaan DZ juga hanya sebatas perkiraan berdasarkan program tersebut dan dipilih tempat yang sekiranya terdekat dengan wilayah bencana dan memiliki hambatan (*obstacle*) yang relatif kecil. Informasi tentang kondisi cuaca di Mentawai juga tidak banyak diperoleh dan hanya mengandalkan kemampuan pada saat latihan rutin pada saat penerjunan di wilayah yang tidak dikenal (*terjun area*).

Pesawat yang membawa Tim Dalpur *take off* (lepas landas) pukul 06.15 WIB. Perlengkapan yang dibawa merupakan inventaris Batalyon 461 Paskhas. Pada saat di dalam pesawat dan mendekati daerah penerjunan, anggota tim Dalpur berupaya melihat ke wilayah bencana yang akan dijadikan tempat pendaratan (*spotting*). Pada saat berupaya melihat daerah penerjunan tersebut, Tim Dalpur tidak menggunakan alat bantu apapun. Dengan waktu yang cukup mendesak karena akan mengendalikan penerjunan logistik, Tim Dalpur menentukan tempat pendaratan yang kira-kira aman hanya berdasarkan pandangan mata anggota tersebut. Setelah mendarat, permukaan tempat pendaratan tidak rata dan terdapat banyak puing-puing bekas terjangan tsunami. Perlengkapan yang digunakan tidak mengalami kerusakan. Beberapa anggota Tim terpecah dari kelompoknya, namun

tidak terlalu jauh dan dapat berkumpul kembali di titik pendaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemampuan terjun *area* yang sering dilatihkan, sangat bermanfaat untuk penerjunan dalam kondisi wilayah pendaratan yang buruk seperti di Mentawai.

Tugas utama Tim Dalpur pada saat itu adalah membuka komunikasi dari wilayah Pagai Utara dan Selatan kepada pesawat pembawa bantuan dan komunikasi kepada Pos Komando (Posko) Penanggulangan Bencana di Lanud Padang. Selain itu, Tim Dalpur juga membuat *hellypad* untuk pendaratan helikopter yang akan membawa Presiden RI beserta rombongan yang akan meninjau langsung kondisi di Mentawai pasca tsunami. Pencarian korban tsunami juga turut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mencari korban dari pihak keluarganya. Tim Dalpur sebenarnya tidak memiliki kemampuan dalam pencarian korban bencana. Tugas pencarian korban tersebut merupakan keahlian dari tim Sarpur. Namun karena kondisi yang mengharuskan Tim Dalpur yang melakukan pertolongan, maka tugas tersebut dapat dijalankan.

Pada saat pengendalian penerjunan logistik, kondisi cuaca cukup cerah dengan kecepatan angin lebih kurang 8-10 *knots*. Menurut Komandan Tim Dalpur, pemilihan lokasi penerjunan barang dilakukan dengan melihat kondisi yang ada di lapangan. Permukaan tanah harus cukup rata dengan hambatan (*obstacle*) yang minimal. Hambatan tersebut di antaranya adalah pepohonan, bangunan, genangan air, atau permukaan tanah yang tidak rata. Dari hasil pengamatan terhadap tempat tersebut, maka ditentukan suatu titik yang dianggap paling aman untuk penerjunan barang. Tim Dalpur menggunakan perlengkapannya yaitu radio GTA jenis RF20 untuk mengendalikan penerjunan logistik. Pengendalian dapat dilakukan dengan baik karena kondisi cuaca yang cerah dan komunikasi antara Tim Dalpur dengan pesawat tidak ada hambatan. Alat komunikasi yang digunakan pada saat itu dapat digunakan dengan jelas. Logistik yang diterjunkan dapat mendarat pada jarak lebih kurang 50 meter dari tanda silang (*cross*) yang merupakan titik pusat penerjunan. Penerjunan bantuan menggunakan cara CDS (*Container Delivery System*), yaitu penerjunan barang dengan menggunakan parasut yang berguna untuk menahan laju jatuh barang akibat gravitasi. Barang-barang yang akan diterjunkan

dikemas dengan bungkus khusus dan diletakkan dan diikat di atas papan luncur di dalam pesawat. Di dalam bungkus tersebut terdapat lapisan peredam khusus yang berguna untuk mengurangi efek benturan saat *container* mendarat. Penerjunan barang ini dibantu oleh Tim *Jump Master* (JM) yang berada di dalam pesawat. Pelaksanaan penerjunan dapat berlangsung dengan lancar dan barang yang diterjunkan tidak mengalami kerusakan.

Misi Tim Dalpur selanjutnya adalah menuju ke wilayah Sikakap pada tanggal 30 Oktober 2010 untuk bergabung dengan Pos Komando TNI AU. Di tempat tersebut, Tim Dalpur bekerjasama dengan personel dari Lanud Padang untuk bersama-sama mengendalikan pesawat yang membawa bantuan tenaga manusia atau barang. Jumlah total pengendalian pesawat yang dilakukan adalah 138 penerbangan baik pesawat militer maupun sipil selama rentang waktu 29 hari. Menurut Kapten Addin, salah satu personel dari Lanud Padang, kerjasama antara personel Paskhas dan personel Lanud dapat mencukupi kebutuhan pengendalian pesawat yang masuk atau keluar Sikakap. Pengaturan dan pengendalian pesawat-pesawat tersebut sangat diperlukan mengingat kondisi alat bantu penerbangan di tempat tersebut sangat minim dan bergantung kepada peralatan yang dibawa oleh Paskhas dan Lanud Padang. Dengan adanya personel dari Paskhas, tugas-tugas yang menjadi domain TNI AU dapat dilaksanakan. Keterbatasan jumlah personel dari Lanud Padang menjadi kendala tersendiri untuk menghadapi tanggap darurat bencana yang cukup besar seperti kejadian tsunami Mentawai tersebut (Laporan Pelaksanaan Dukungan Penanggulangan Bencana Alam Di Kepulauan Mentawai 2010).

Dengan melihat organisasi tugas, Tim Dalpur memiliki komposisi yang lengkap untuk penanganan awal dalam suatu tanggap darurat. Unit PLLU merupakan bagian yang memiliki peran paling penting yaitu mengendalikan pesawat menuju sasaran, seperti penerjunan barang-barang bantuan kemanusiaan maupun orang pada posisi yang tepat dan aman. Hal ini telah dilakukan dengan menerjunkan barang sebanyak 8 koli (*pack*) bantuan dari Presiden RI serta pengendalian pendaratan pesawat-pesawat lainnya yang membawa bantuan barang atau tenaga manusia. Apabila ada pasukan lain yang akan diterjunkan kemudian, maka tugas tersebut merupakan

tanggungjawab unit PLLU untuk mengarahkan pesawat yang membawanya. Selanjutnya adalah unit kesehatan yang dapat melakukan perawatan awal terhadap korban bencana alam yang ditemukan. Unit kesehatan ini sebenarnya hanya digunakan untuk merawat personel Tim Dalpur yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Namun dalam praktek di lapangan, mereka dapat digunakan untuk memberikan pertolongan pertama bagi korban bencana tersebut sehingga datang pertolongan kesehatan yang lebih lengkap atau melalui langkah evakuasi medis.

Dalam pelaksanaan tanggap darurat tsunami Mentawai, Tim Dalpur menemui kendala-kendala di antaranya adalah kondisi wilayah yang belum dikenal sebelumnya, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta komunikasi dengan instansi lain yang masih belum dapat terhubung. Untuk mengetahui kondisi wilayah bencana, Tim Dalpur mendapatkan informasi yang menjadi gambaran awal melalui jalur internet. Hal ini cukup membantu untuk lebih mendalami kondisi di Mentawai. Ketika kondisi cuaca yang tidak menentu dan cenderung cuaca yang buruk, tidak dapat diatasi dengan menggunakan perlengkapan yang dimiliki oleh Tim Dalpur. Pesawat harus menunggu kondisi cuaca menjadi relatif cerah atau memenuhi syarat untuk penerjunan barang dan manusia. Kondisi cuaca yang buruk juga menghambat komunikasi antara Tim Dalpur dengan instansi yang berada sekitar DZ. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi perlengkapan komunikasi yang dibawa oleh Tim Dalpur berupa radio *Ground To Ground (GTG)* jenis PRC-2090 buatan Australia. Sinyal radio tersebut tidak mampu menembus cuaca hujan atau berkabut, sehingga proses komunikasi pun menjadi terhambat. Setelah mengendalikan penerjunan barang di Silabu, Tim Dalpur harus bergerak menuju Pos Komando di Sikakap dengan menggunakan kapal kecil. Namun karena kondisi gelombang laut yang cukup tinggi, tim Dalpur harus tertahan di Silabu selama tiga hari, padahal persediaan logistik yang dimiliki sudah habis. Kondisi tersebut mengharuskan mereka bertahan hidup dengan bahan makanan seadanya yang mereka temui, seperti kelapa dan binatang laut. Tim Dalpur tetap dapat bertahan dan mampu mencapai Sikakap untuk bergabung dengan personel TNI AU lainnya. Dalam hal ini kendala-kendala yang dihadapi tidak menjadi suatu hambatan dan merupakan tantangan yang harus

dihadapi. Kekurangan yang ditemui pada bidang perlengkapan, dan personel dapat diatasi dengan banyaknya latihan selama berada di *home base* sehingga pada saat di lapangan, tugas tetap dilaksanakan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi mental dan motivasi yang tinggi dari pasukan untuk menyelesaikan misi yang dibebankan. Para pasukan memiliki prinsip bahwa setiap tugas harus diselesaikan dan hambatan bukanlah suatu halangan untuk tidak dapat menyelesaikan permasalahan di daerah operasi.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas maka dapat dilihat bahwa Korpaskhas TNI AU pada dasarnya telah melaksanakan strategi-strategi dalam upaya meningkatkan optimalitas pelaksanaan dukungan penanggulangan bencana alam di kepulauan Mentawai. Adapun strategi yang dilaksanakan oleh Korpaskhas TNI AU tersebut adalah strategi militer, dimana strategi militer adalah sebuah seni dan ilmu mengkoordinasikan pembinaan, penggelaran, dan penggunaan kekuatan militer dalam rangka mencapai tujuan keamanan nasional (Drew dan Snow, 2014: 17). Sedangkan menurut Andre Beaufre dalam Matra Udara (2010: 51), strategi militer adalah seni menggunakan kekuatan sehingga kekuatan itu memberikan sumbangan yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh kebijaksanaan dalam bidang politik. Berdasarkan pada beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi Korpaskhas TNI AU dalam operasi dukungan penanggulangan bencana alam merupakan seni dan ilmu yang digunakan TNI Angkatan Udara, khususnya Korpaskhas TNI AU dalam mengkoordinasikan pembinaan, penggelaran, dan penggunaan kekuatan dalam rangka melaksanakan operasi dukungan penanggulangan bencana alam sehingga dapat dilaksanakan dengan optimal dengan tujuan utama untuk menjaga keamanan nasional.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas juga dapat dilihat beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Korpaskhas TNI AU pada pelaksanaan dukungan penanggulangan bencana alam di kepulauan Mentawai yang terdiri dari pertama melakukan persiapan personel dan perlengkapan secara cepat dan cermat, hal tersebut dikarenakan persiapan Persiapan yang dilakukan untuk melakukan misi penerjunan di Kepulauan Mentawai hanya disediakan waktusekitar 12 jam. Kedua membagi pasukan kerja ke dalam unit-unit kecil yang

memiliki tugas- tugas tersendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembagian dilakukan agar unit-unit kecil bisa lebih fokus pada tugas dan tanggungjawabnya. Ketiga Korpaskhas TNI AU dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam bergerak atas permintaan atau perintah dari institusi yang lebih tinggi, yaitu TNI Angkatan Udara, Markas Besar TNI, maupun Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memperjelas jalur komando sehingga pengerahan anggota Korpaskhas TNI AU bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Keempat dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam, Korpaskhas TNI AU menggerakkan pasukannya dengan menggunakan perlengkapan khusus. Perlengkapan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta tugas yang harus dilaksanakan. Kelima dalam memasuki wilayah terjadinya bencana, Korpaskhas TNI AU menggunakan taktik tertentu yaitu berupa penyusupan ke daerah operasi dengan penerjunan. Penggunaan taktik ini disesuaikan dengan kondisi karena jalur darat dan laut tidak dapat digunakan. Keenam pada saat di lapangan, Korpaskhas TNI AU selalu melaksanakan koordinasi dengan satuan lain. Koordinasi dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah proses tanggap darurat (*aliansi dengan satuan lain*) dan agar tugas yang dilakukan dapat menjadi lebih efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan analisa yang disajikan, maka dapat ditarik simpulan bahwa strategi Korpaskhas TNI AU dalam operasi dukungan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai tahun 2010 yaitu melakukan persiapan personel dan perlengkapan secara cepat dan cermat, membagi pasukan kerja ke dalam unit-unit kecil yang memiliki tugas-tugas tersendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas penanggulangan berdasarkan permintaan atau perintah dari institusi yang lebih tinggi, menggerakkan pasukannya dengan menggunakan perlengkapan khusus, menggunakan taktik tertentu dalam memasuki wilayah terjadinya bencana, dan selalu melaksanakan koordinasi dengan satuan lain pada saat di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. (2017). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*.  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Drew, D.M., Snow, D.M. (2014). *Menyusun Strategi – Pengenalan Terhadap Proses Keamanan Nasional dan Permasalahannya*.  
Jakarta: CNSS.
- Gayoe, F., James, C. (2019). *Introduction to China's Military Operations Other Than War*.  
Singapore: RSIS and Nanyang Technological University.
- Joint Chiefs of Staff. (1995). *Joint Doctrine for Military Operations Other than War: Joint Pub 3-0*.  
CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Khambali, I. (2017). *Manajemen Penanggulangan Bencana* Yogyakarta: Andi.
- Marsetio. (2015). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Nurjanah, Sugiharto, R., Kuswanda, D., BP, S., Adikoesoemo. (2013).  
*Manajemen Bencana*.  
Bandung: Alfabeta.
- Salatun, A.S. (2000). *Air Power Kekuatan Udara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

### Sumber Lain:

Laporan Pelaksanaan Dukungan Penanggulangan Bencana Alam Di Kepulauan Mentawai 2010 Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).  
Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019.